

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Banyak buku, jurnal, artikel dan sumber ilmiah lainnya yang menjelaskan tentang pembangunan dan kesenjangan pembangunan yang terjadi di suatu daerah. Acuan dan dasar-dasar dari penelitian ini yang berupa temuan-temuan ataupun dalam bentuk teori dari hasil penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan sebagai referensi dan data serta informasi pendukung. Pada penelitian ini, peneliti memasukkan dua penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dimana kedua penelitian tersebut ada hubungannya dan berguna secara langsung untuk permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti saat ini. *Pertama*, Tugas Akhir yang disusun oleh Widi Asih dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun 2015 yang berjudul “Analisis Ketimpangan dalam Pembangunan Ekonomi antar Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013”. Hasil dari penelitian ini adalah perkembangan kemajuan perekonomian tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2004 hingga 2013 menunjukkan bahwa tidak semua kecamatan mengalami pertumbuhan yang positif. Terdapat 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap mengalami perkembangan yang berfluktuasi negatif dan mengalami kemunduran menjadi daerah yang relatif tertinggal. Bahkan terdapat kecamatan yang mengalami perkembangan perekonomian tetap selama tahun pengamatan menjadi daerah relatif tertinggal. Hal-hal yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi Kecamatan di Cilacap ini diantaranya adalah pertumbuhan kompetitif, karena daerah atau Kecamatan yang mampu menciptakan dan memanfaatkan keuntungan kompetitif menjadi kekuatan basis ekspor, maka

akan dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonominya. Selain itu, jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dan keluarga miskin juga sangat berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Cilacap. Hal ini dikarenakan, jumlah penduduk dengan taraf pendidikan yang lebih tinggi secara tidak langsung akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Begitu pula dengan jumlah keluarga miskin, semakin tinggi jumlah keluarga miskin, berarti ini menunjukkan penurunan terhadap gap diantara keluarga sejahtera dan keluarga miskin. *Kedua*, Skripsi yang disusun oleh Ketut Wahyu Dhyatmika Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2013 yang berjudul “Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran”. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang ukuran ketimpangan pembangunan, hubungan antara pengangguran dengan ketimpangan, pemekaran wilayah dan hubungan pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan. Selain itu, penanaman modal asing atau investasi juga sangat berhubungan dengan ketimpangan yang terjadi di suatu daerah. Investasi cenderung meningkatkan ketimpangan regional. Permintaan yang meningkat di wilayah maju akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang. Hal ini dibuktikan secara empiris oleh Shinta dan Maruto (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Disparitas Pendapatan Antar Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Wilayah Pantura Propinsi Jawa Tengah)”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ketimpangan investasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan.

Menurut kedua penelitian diatas, ada persamaan dan perbedaan yang dihasilkan dari masing-masing penelitian, hasil tersebut disesuaikan dengan fokus penelitian yang diperoleh dan dilakukan oleh masing-masing peneliti. Persamaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini dengan kedua penelitian diatas yang sudah dilakukan sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang ketimpangan atau kesenjangan pembangunan disuatu daerah. Perbedaannya adalah kedua penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya tersebut ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal apa saja yang berhubungan dengan ketimpangan atau kesenjangan pembangunan di suatu daerah dilihat dari aspek ekonominya, sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah lebih ke gambaran dan penjelasan tentang kesenjangan pembangunan sekaligus faktor penyebab dan dampak kesenjangan pembangunan tersebut.

Selain itu perbedaan lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini menjabarkan tentang dampak dari kesenjangan pembangunan infrastruktur yang terjadi disuatu daerah terhadap kesejahteraan masyarakatnya, dengan kata lain pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini lebih ditonjolkan pembangunan infrastrukturnya dan aspek sosialnya. Lokasi penelitian-penelitian sebelumnya juga berbeda dengan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti saat ini.

## **B. Pengertian Pembangunan**

Pada dasarnya pembangunan merupakan langkah-langkah untuk menuju kepada perubahan yang lebih baik, dimana dalam pembangunan ada keinginan untuk dicapai, baik itu kemajuan maupun perkembangan. Pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen baik masyarakat maupun pemerintah. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian

usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Hasibuan, 2007:11). Pembangunan dilakukan sebagai usaha atau proses usaha yang dilakukan secara sadar dan dalam keadaan yang benar-benar siap serta dengan perencanaan yang sudah matang, dimana pembangunan ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perubahan dan pertumbuhan serta perkembangan bagi Bangsa, Negara maupun Pemerintah. Selain itu, adanya pembangunan juga diharapkan untuk mampu mengubah keadaan suatu negara menjadi lebih modern.

Pembangunan adalah suatu proses dinamis, kebijaksanaan harus memberi peluang kepada kenyataan tetapi harus mengandung kepastian dan kesinambungan bagi pelaksanaan yang fiktif menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dengan keridhoan dari Tuhan Yang Maha Esa (Bintoro, 1996:3). Pembangunan merupakan suatu perbuatan yang penuh dengan semangat tinggi untuk mencapai kesetaraan dengan menggunakan akal dan pemikiran yang tajam dimana hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada kondisi yang benar-benar nyata dan sudah terbukti adanya. Pembangunan harus bersifat pasti dan tidak bisa diragukan lagi kemungkinannya serta harus berkelanjutan secara terus-menerus baik caranya, rancangannya, maupun keputusannya demi terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan hidup dengan kemakmuran sesuai yang tercantum dalam Pancasila dan dengan berkat dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Iwan dan

Rochmin, 2004: 9). Makna dari pembangunan adalah sebuah usaha yang sudah direncanakan dan sudah dibahas sebelumnya agar menjadi jelas dan tidak simpang siur untuk mendapatkan hasil yang beragam sehingga bisa dirasakan oleh seluruh aspek kehidupan dan lapisan masyarakat serta sudah diakui kebenarannya tanpa harus diragukan lagi oleh seluruh masyarakat atau warga negara demi mencapai tujuan dan memenuhi harapan seluruh warga negara dimana hal tersebut cenderung kepada pemecahan masalah, keberhasilan masyarakat dimasa depan, serta pembinaan nilai dan moral sekaligus etika seluruh lapisan masyarakat. Menurut Bryant dan White (1987: 132) bahwa ada beberapa implikasi atau keterlibatan dari pengertian pembangunan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok.
2. Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan, pemerataan dan kesejahteraan.
3. Pembangunan berarti mendorong dan menaruh kepercayaan untuk membimbing dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya, kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan.
4. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan dihormati.

Pengertian pembangunan yang mengandung beberapa keterlibatan diatas mempunyai makna *pertama*, pembangunan sebagai upaya untuk menimbulkan atau

membangunkan kelebihan yang dimiliki oleh manusia dalam hal ini masyarakat yang selama ini terpendam maupun yang tidak disadarinya baik itu individu masyarakat maupun kelompok masyarakat. *Kedua*, adanya pembangunan yaitu untuk memunculkan dan meningkatkan kebersamaan serta kekompakan seluruh lapisan masyarakat, mengatasi ketimpangan dengan melakukan pemerataan baik dalam bentuk fisik maupun sosial dan ekonomi, mengupayakan dan menjadikan seluruh lapisan masyarakat makmur dan sejahtera serta hidup dalam kedamaian dan kecukupan tanpa adanya kesengsaraan dalam kehidupan sehari-hari. *Ketiga*, pembangunan merupakan dorongan dan pemberian kepercayaan dalam hal ini pada suatu daerah untuk menunjukkan atau mengarahkannya sesuai dengan kemampuan dan apa yang dimilikinya, hal ini diberikan dalam bentuk kesempatan atau peluang yang sama dan setara dengan daerah lainnya untuk mengantisipasi adanya ketidakadilan dan kecemburuan sosial yang berupa kebebasan dalam memilih apa saja yang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhannya serta wewenang untuk menentukan dan memutuskan segala hal yang berkaitan dengan daerahnya. *Keempat*, pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk merubah keadaan dari yang ketergantungan menjadi lebih mandiri sehingga terciptanya kesetaraan serta hubungan yang sama-sama saling menguntungkan tanpa ada yang terbelakang, hal ini juga untuk meningkatkan martabat agar bisa dihormati dan dihargai oleh yang lainnya.

Terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera tidak lepas dari hasil pembangunan yang merata. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Munawar dkk (Tafsiran Pancasila dan UUD 1945: 31) bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil

dan makmur, kebijakan operasionalisasi pembangunan bertumpu pada Trilogi Pembangunan yang terdiri dari tiga unsur diantaranya:

a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

Pembangunan harus dilakukan secara merata disemua daerah, begitupun dengan hasilnya juga harus dirasakan oleh masyarakat secara adil dan merata. Setiap warga masyarakat harus bisa mendapatkan dan menerima hasil dari pembangunan yang layak bagi masyarakat dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

b. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesuai dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu pemerataan pembangunan juga bisa dilakukan hanya jika ekonomi tumbuh semakin tinggi.

c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

Masyarakat bisa hidup dengan aman, tentran dan tertib sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama dan atas kesadaran diri sendiri untuk mendorong terjadinya kestabilan secara berkelanjutan.

Beberapa penjelasan tentang pembangunan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan seluruh warga negara secara terus-menerus dan berkelanjutan tanpa terputus-putus demi untuk mencapai tujuan yaitu terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera dimana seluruh masyarakat bisa bersaing dengna masyarakat

lain sehingga tidak ada lagi keterbelakangan dan ketertinggalan. Pembangunan wajib dilakukan disuatu daerah dan dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat. Sebagai warga negara, Pemerintah dan masyarakat harus bersatu dan bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan.

Masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan, dan pemerintah berkewajiban memberikan pengarahannya dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan individu usaha dan bahwa sebaliknya, dunia usaha perlu memberikan tanggapan dengan kegiatan-kegiatan nyata (Hendra, 1987: 271). Kreatifitas masyarakat harus dikembangkan semaksimal mungkin agar masyarakat bisa berperan serta dalam pembangunan. Pemerintah sebagai elemen yang paling tinggi dalam tatanan negara dimana pemerintah mempunyai kualitas pendidikan dan pengetahuan yang lebih luas dan lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam mengajarkan dan mengarahkan masyarakat agar kreatifitas yang dimiliki masyarakat bisa dikeluarkan semaksimal mungkin. Selain itu pemerintah juga mempunyai tanggung jawab atas terciptanya persaingan yang bersih tanpa ada permainan yang tidak baik atau kecurangan dalam masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang adil tanpa adanya ketidakadilan. Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat harus mempunyai hubungan yang baik dan erat.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muljana (1995:3) bahwa pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah dan oleh masyarakat. Yang dilaksanakan oleh Pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, sedangkan yang dilaksanakan oleh masyarakat umumnya yang bersifat *directly producing*, atau yang langsung menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan



konsumen, baik perorangan, rumah tangga maupun industri. Pemerintah dan masyarakat sangat berperan penting dalam sebuah pembangunan, dimana Pemerintah sebagai penyedia infrastruktur dan sarana prasarana yang berupa bangunan fisik seperti jalan, listrik, transportasi dan lain sebagainya. Selain itu, Pemerintah juga sebagai penyedia lembaga-lembaga yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat dimana lembaga tersebut mempunyai kegunaan yang sangat mendasar dan perlu sekali adanya seperti Rumah Sakit lembaga pendidikan serta lembaga-lembaga lainnya. Hal ini diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar menjadi lebih maju sekaligus sebagai penyokong kegiatan masyarakat dalam bidang ekonomi supaya perekonomian masyarakat menjadi lancar dan berkembang tanpa adanya hambatan.

Selain Pemerintah, masyarakat juga mempunyai fungsi tertentu dan tugas yang tak kalah pentingnya dengan Pemerintah dalam sebuah pembangunan, dimana masyarakat bertugas untuk mengeksplor segala kemampuan dan kreatifitasnya agar bisa menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa secara langsung untuk dinikmati dan digunakan oleh para konsumen. Masyarakat harus bisa menarik konsumen sebanyak mungkin agar pembangunan yang ada semakin meningkat. Hal ini dilakukan sebagai investasi dari masyarakat maupun Pemerintah. Sebagaimana kita ketahui investasi meliputi sedikit-dikitnya 2 jenis, yaitu: yang bersifat mengganti yang susut dan yang bersifat menambah kapasitas (Muljana, 1995: 3). Pembangunan baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat dua-duanya adalah investasi, dimana dengan adanya pembanguan yang dilakukan berarti Pemerintah dan masyarakat sudah membangun dan menanam modal untuk menarik perhatian dari banyak orang baik investor maupun konsumen. Hal ini

nantinya akan berdampak terhadap ketertarikan dari masyarakat banyak sehingga pertumbuhan ekonominya akan semakin cepat, secara otomatis pembangunannya juga akan semakin meningkat.

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk investasi, dalam hal ini investasi yang sifatnya menambah kapasitas, dimana pembangunan dilakukan untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang sebelumnya masih belum ada atau menambah fasilitas-fasilitas yang ada agar masyarakat bisa lebih maju dan berkembang lagi. Adanya pembangunan yang dilakukan ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjadikan masyarakat yang berkualitas, menanggulangi kemiskinan dan lain sebagainya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Hendra (1987: 353) bahwa pada hakikatnya pembangunan adalah pelaksanaan investasi netto secara berkesinambungan diberbagai sektor dan bidang, pembangunan dibidang-bidang ekonomi juga dilaksanakan dengan mengadakan investasi netto diberbagai bidang yang bersangkutan misalnya pembangunan dibidang pendidikan dan pembangunan dibidang kesehatan. Pembangunan dibidang pendidikan dengan mendirikan gedung-gedung sekolah atau menambah tenaga pengajar merupakan sebagai bentuk investasi. Sama halnya dengan pembangunan dibidang kesehatan seperti membangun Rumah Sakit yang disertai dengan disediakannya fasilitas-fasilitas dan alat-alat kesehatan yang memadai juga merupakan bentuk investasi, dengan kata lain pembangunan sebagai bentuk investasi tidak hanya berlaku untuk pembangunan ekonomi saja, namun pembangunan dibidang lainnya juga merupakan bentuk investasi yang sangat besar, dimana negara mempunyai kemampuan yang besar

dalam melayani masyarakatnya sehingga nantinya akan lahir generasi-generasi penerus yang berkualitas dan bisa memajukan negara.

Selanjutnya Todaro dan Smith (2006: 43) menjelaskan bahwa kesuksesan pembangunan bergantung tidak hanya pada sektor swasta yang dinamis dan sektor publik yang efisien, tetapi juga pada sektor masyarakat yang aktif. Pembangunan tidak hanya bisa diwujudkan dengan dukungan yang diberikan oleh lembaga-lembaga swasta sebagai pemberi semangat yang tinggi baik dalam bentuk modal maupun tenaga. Begitupula jika hanya dengan dukungan banyak pihak yang mengharapkan pembangunan selesai tepat pada waktu yang sudah ditentukan, pembangunan tidak akan semudah itu terlaksana. Namun dalam pembangunan, yang tak kalah pentingnya adalah peran masyarakat yang selalu aktif dan memberikan kontribusi yang besar baik dalam bentuk menjaga, merawat maupun mengawasi. Masyarakat dituntut aktif agar pembangunan yang ada bisa tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, dengan kata lain pembangunan tidak hanya bisa mengandalkan satu atau dua sektor saja, tetapi pembangunan bisa direalisasikan apabila ada kerjasama dan keaktifan dari berbagai sektor seperti pemerintah, masyarakat, swasta, LSM dan lain sebagainya.

Partisipasi semua pihak ini sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang stabil terlebih kepada masyarakat. Masyarakat yang aktif dan mempunyai partisipasi yang besar dalam segala hal di daerahnya termasuk dalam pembangunan akan menjadikan masyarakat lebih mampu dalam hal berkomunikasi dan mampu mengkritisi hal-hal yang ganjil baginya. Partisipasi publik yang murni disemua tingkat memberikan landasan bagi terbentuknya pemerintah yang demokratis dan responsif, partisipasi tidak akan mengobati semua penyakit pemerintah termasuk

keterbatasan demokrasi itu sendiri namun pada derajat tertentu akan menghilangkan penyakit politik reformasi kebijakan pembangunan (Todaro dan Smith, 2006: 59). Semua warga negara dari kalangan masyarakat hingga pemerintah wajib berpartisipasi dalam pembangunan dimana partisipasi merupakan suatu peran yang paling penting dalam pembangunan. Ketika seluruh elemen masyarakat sadar diri untuk berpartisipasi yang sebenarnya tanpa ada tujuan-tujuan lain didalamnya maka hal ini melahirkan bentuk pemerintahan yang sifatnya demokrat dimana masyarakat juga bisa bebas dalam menentukan pembangunan dan lain sebagainya selama masih dalam batas wajar dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan kata lain masyarakat juga berperan serta sebagai pemimpin negara dengan diwakili oleh pemerintahan rakyat.

Partisipasi pembangunan dari semua pihak akan sangat membantu dalam membentuk negara yang pemerintahannya selalu cepat tanggap dalam segala hal, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dalam negara khususnya ditengah-tengah masyarakat bisa diatasi secepat mungkin. Pada dasarnya penyakit yang dimiliki oleh pemerintah adalah kurangnya kesempatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam hal kebebasan menyuarakan gagasan-gagasannya, sehingga partisipasi dalam hal ini kurang bisa maksimal. Namun disisi lain, adanya partisipasi masyarakat yang besar setidaknya bisa membersihkan penyakit-penyakit politik baik dalam hal kebijakan, tindakan maupun siasat yang dilakukan oleh para pelaku pemerintahan tertentu dalam merubah dan melakukan pembangunan.

Pembangunan nasional adalah rangkaian usaha secara sadar berencana untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi program-program pembangunan yang dilaksanakan secara terus-menerus

untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (Bintoro, 1996:4). Pembangunan dilakukan sebagai usaha untuk memperbaiki kondisi yang awalnya buruk menjadi keadaan yang lebih baik sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui dan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya dimana hal itu terdiri dari berbagai rancangan-rancangan yang akan dijalankan dalam pembangunan tersebut dan dikerjakan dengan berkelanjutan tanpa berhenti untuk mewujudkan dan mencapai sebuah tujuan dalam pembangunan yang skalanya mencakup suatu Negara dan bersifat kebangsaan.

Pembangunan yang dilakukan tidak selamanya akan berjalan mulus baik dari proses pembangunannya maupun pada saat setelah pelaksanaan pembangunannya. Hal ini dikarenakan pada dasarnya pembangunan dilakukan untuk menghasilkan perubahan. Perubahan tersebut akhirnya akan menjadi salah satu penyebab dari tantangan pembangunan. Perubahan dalam masyarakat bisa bermacam-macam baik positif maupun negatif. Menurut Hendra (1987: 487) bahwa yang menonjol dalam tantangan pembangunan adalah meluasnya potensi friksi dan konflik antara individu dan antara kelompok masyarakat, terutama akibat gerak mobilitas horizontal dan vertikal penduduk. Adanya pembangunan akan mengakibatkan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, maka dari itu pembangunan harus direncanakan secara terstruktur dan tidak bisa setengah-setengah. Tantangan yang dihadapi pada saat dilaksanakannya pembangunan adalah terjadinya persaingan yang ketat antara individu maupun kelompok. Persaingan tersebut dilakukan untuk mengejar harga diri setinggi-tingginya, sehingga tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya konflik baik antar individu maupun kelompok.

### **C. Pengertian Pembangunan Daerah**

Adanya kebijakan Otonomi Daerah membuat sistem pemerintahan di Indonesia harus dirubah yaitu dengan menyerahkan dan mempercayakan pemerintahan daerah kepada daerah itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban pemerintah pusat sekaligus untuk meningkatkan perkembangan di daerah. Kebijakan otonomi daerah diharapkan mampu memaksimalkan pembangunan di daerah dimana pemerintah daerah sebagai aparat yang lebih mengenal kondisi daerahnya sehingga nantinya akan tercipta pembangunan yang lebih merata sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerahnya.

Perubahan sistem pemerintahan Indonesia melalui kebijakan Otonomi Daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, telah membawa perubahan dalam sistem pembangunan, dimana Pemerintah Daerah diberi wewenang yang lebih dalam mengatur daerahnya masing-masing. Adanya kebijakan otonomi daerah ini diharapkan agar bisa memaksimalkan kinerja Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya sekaligus memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakatnya agar daerahnya menjadi lebih maju dan masyarakat bisa berkembang. Disinilah masyarakat dan daerah nantinya akan mempunyai sumbangsih bagi Negara untuk kemajuan dan perkembangan Negara.

Perubahan yang terjadi pada dasarnya menyangkut dua hal pokok yaitu: *pertama*, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam

melakukan pengelolaan pembangunan (Desentralisasi Pembangunan). *Kedua*, Pemerintah diberikan sumber keuangan baru dan kewenangan pengelolaan keuangan yang lebih besar (Desentralisasi Fiskal) (Sjafrizal, 2014: 14). Perubahan yang dilakukan selama diberlakukannya kebijakan Otonomi Daerah yaitu dalam hal wewenang dan kekuasaan dibidang pembangunan, dimana yang awalnya Pemerintah Daerah hanya mempunyai sedikit kewenangan, dengan adanya otonomi daerah Pemerintah Daerah akhirnya mempunyai kekuasaan penuh atas pembangunan di daerahnya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan di daerah ditentukan dan diputuskan oleh Pemerintah daerah.

Selain kewenangan dalam pembangunan, adanya otonomi daerah juga menjadikan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab penuh atas keuangan daerahnya. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengelola sekaligus menyalurkan keuangan daerah untuk hal-hal yang perlu dilakukan dalam memajukan dan mengembangkan daerahnya. Kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini dengan tujuan agar pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut bisa maksimal, dimana pembangunan yang dilakukan nantinya benar-benar bisa mensejahterakan masyarakatnya, dengan kata lain pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Hal ini juga dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah bersangkutan (*indogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal.

Sedangkan keberhasilan pembangunan daerah, selain sebagai bentuk andil dalam pembangunan nasional, tetapi juga ditujukan dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah, menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad, 1999: 108). Pemberian kekuasaan kepada daerah untuk mengurus sendiri daerahnya tidak selamanya berjalan dengan mulus, ada juga masalah yang ditimbulkan dari pembangunan daerah dimana pada pembangunan daerah lebih difokuskan terhadap pembangunan sesuai dengan potensi masyarakatnya. Maksudnya adalah pembangunan yang ada di daerah masih tetap bersifat kedaerahan dimana pembangunannya disesuaikan dengan budaya di daerah tersebut, dengan kata lain pembangunan di daerah dilakukan sesuai kemampuan masyarakatnya.

Hal tersebut mengakibatkan kurang berkembangnya potensi yang dimiliki oleh masyarakat, dimana pembangunan yang dilakukan tidak dikombinasikan dengan pembangunan yang ada di luar daerah tersebut, sehingga sifatnya masih kedaerahan. Selain itu kekurangan pembangunan daerah juga adalah pembangunannya ditekankan pada sumber daya fisik yang ada di daerah tersebut, maksudnya adalah pembangunan yang dilakukan masih tetap sama dengan pembangunan sebelumnya, tidak ada perubahan. Hal ini berdampak terhadap lambatnya kemajuan masyarakat karena tidak adanya pembaharuan dalam pembangunan. Pembangunan daerah harus bisa mengkombinasi antara potensi pembangunan di daerahnya dengan pembangunan di daerah lain sehingga masyarakatnya bisa cepat dalam menuju perubahan yang lebih modern.

Sesuai dengan keberhasilan yang diharapkan dalam pembangunan daerah, dimana pembangunan daerah yang berhasil merupakan bentuk dari pembangunan



nasional. Pembangunan daerah dapat dikatakan berhasil apabila pembangunannya sudah mencakup pembangunan nasional, maksudnya adalah pembangunan yang ada di daerah tersebut sifatnya nasional bukan kedaerahan. Pembangunan daerah tidak hanya dilakukan untuk membangun sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakatnya saat itu, tetapi pembangunan daerah juga dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, mengeksplorasi kekayaan yang dimiliki daerah tersebut untuk nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pembangunan daerah juga dilakukan untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakatnya. Memaksimalkan dan mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut akan membuka banyak lahan pekerjaan bagi masyarakatnya sehingga masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak perlu keluar daerah untuk mencari pekerjaan. Meningkatkan kegiatan ekonomi serta mengembangkan perekonomian di daerah juga merupakan tujuan dari pembangunan daerah. Perubahan ekonomi yang lebih meningkat akan menjadikan pembangunan di daerah tersebut lebih maju.

Permasalahan yang ada di daerah baik permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya maupun permasalahan daerah itu sendiri akan mampu diatasi dengan adanya pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Adanya kebijakan otonomi daerah hingga akhirnya ada pembangunan daerah ini mempunyai alasan tersendiri, dimana alasan-alasan tersebut dianggap cukup relevan dengan perlunya pembangunan yang dilakukan di daerah. Berikut adalah beberapa alasan menurut Iwan dan Rochmin (2004: 189-191) diantaranya adalah:

- a. Pembangunan daerah sangat tepat diimplementasikan dalam perekonomian yang mengandalkan pengelolaan sumber-sumber daya publik (*common and public resources*), antara lain sektor kehutanan, perikanan, atau pengelolaan wilayah perkotaan.
- b. Pembangunan daerah diyakini mampu memenuhi harapan keadilan ekonomi bagi sebagian banyak orang.
- c. Pembangunan daerah dapat menurunkan biaya-biaya transaksi (*transaction cost*).
- d. Pembangunan daerah dapat meningkatkan daya beli domestik.

Ada empat alasan yang dijelaskan dalam relevansi pembangunan daerah, dimana keempat alasan tersebut mempunyai arti yang sangat berhubungan erat dalam mengembangkan dan memajukan daerah baik dari sektor perekonomian maupun yang lainnya. *Pertama*, dalam pembangunan daerah yang dilakukan oleh daerah itu sendiri, potensi yang dimiliki oleh daerah khususnya pada sumber daya alam nya mempunyai kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar dimana sumber daya tersebut tidak hanya dapat diwujudkan, tetapi juga dapat dijamin bahwa peningkatan produksinya akan semakin besar dan terus-menerus berkelanjutan. *Kedua*, dengan adanya otonomi daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri. Terciptanya keadilan dan pemerataan di seluruh daerah masing-masing tanpa adanya eksploitasi. Pembangunan daerah dilakukan untuk memberikan keadilan bagi daerah tersebut dimana hasil potensi yang didapatkan dan dimiliki oleh daerah tersebut juga bisa dinikmati olehnya serta yang merasakan hasil itu adalah yang mempunyai potensi itu juga. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan paradigma masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah

pusat selalu semaunya sendiri menikmati dan mengeksploitasi potensi yang dimiliki oleh daerah tanpa ada timbal balik yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah tersebut seperti pembangunan. Adanya kebijakan otonomi daerah dan pembangunan daerah ini meminimalisir terjadinya ketidakadilan sehingga terbentuknya kesetaraan antar perkotaan dan pedesaan. *Ketiga*, pembangunan daerah diharapkan mampu menurunkan biaya-biaya pembangunan yang dilakukan oleh Negara. Sebagai Negara yang sangat luas dan terdiri dari beribu-ribu pulau, Indonesia mempunyai tanggung jawab yang sangat berat dalam pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, untuk meringankan beban pemerintah sekaligus mengurangi biaya pembangunan seperti biaya informasi, biaya transportasi dan lain sebagainya maka pemerintah memberlakukan kebijakan otonomi daerah. Hal ini akan lebih efektif bagi pemerintah pusat maupun daerah karena kemungkinan untuk kesenjangan pembangunan sangatlah kecil. *Keempat*, semakin besar pembiayaan yang dikeluarkan dalam pembangunan daerah juga akan berdampak terhadap timbulnya penambahan penghasilan untuk meningkatkan dan memperbanyak sumber daya serta modal dari daerah lainnya. Hal ini tidak hanya melibatkan kemampuan daerah dalam menghasilkan sesuatu atau kesejahteraan untuk masyarakatnya, tetapi juga sebagai bentuk dan bukti bahwa daerah tersebut sudah bisa mandiri dan tidak serta merta bergantung kepada pemerintah pusat. Selain dari keempat alasan relevansi diatas, berikut juga ada tiga hal yang sangat relevan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah menurut Iwan dan Rochmin (2004: 191) diantaranya sebagai berikut:

a. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan

Pembangunan daerah pada dasarnya dilakukan untuk melakukan pemerataan pembangunan diseluruh daerah sehingga terhindar dari kesenjangan pembangunan yang bisa mengakibatkan semakin tingginya angka kemiskinan di daerah.

b. Perlindungan dan kelestarian lingkungan

Adanya pembangunan yang dilakukan didaerah juga untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap daerah tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan lokal. Selain itu pembangunan daerah juga ditujukan untuk memelihara kelestarian lingkungan di daerah tersebut.

c. Peningkatan produktivitas

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa daerah merupakan wilayah yang terisolasi dan terbelakang. Upaya untuk menghilangkan pemikiran tersebut salah satunya dengan pembangunan daerah. Adanya pembangunan daerah diharapkan mampu meningkatkan peranan daerah dalam menghasilkan sesuatu sebagai bentuk pembuktiannya dalam kesetaraan dengan daerah-daerah lainnya.

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembangunan dengan menyesuaikan terhadap potensi yang ada di daerah dan segala hal yang dibutuhkan di daerah tersebut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan yang dilakukan disuatu daerah itu merupakan pembangunan daerah dimana pelaku pembangunan daerah tersebut adalah pemerintah dan masyarakatnya. Agar pembangunan daerah bisa berhasil dan bisa

dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, maka diperlukan perencanaan yang matang serta kerjasama yang berkualitas antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Iwan dan Rochmin (2004: 193) bahwa pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya:

#### 1. Pembangunan sektoral

Kegiatan pembangunan sektoral di daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan potensinya, merupakan suatu upaya untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Potensi dan kebutuhan yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah berbeda, begitupula dengan permasalahannya. Sehingga dalam segi penanganan dan penyelesaian masalahnya juga berbeda-beda untuk setiap daerah. Oleh karena itu pembangunan di daerah juga berbeda-beda dan terbagi menjadi berbagai sektor sesuai dengan kebutuhannya.

#### 2. Pembangunan wilayah

Pembangunan yang meliputi wilayah perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah, yang membentuk suatu sistem kota-desa, harus dilakukan secara terpadu dan saling mengisi. Dalam pembangunan dibagi menjadi pembangunan wilayah dimana pembangunan wilayah ini merupakan pembangunan yang dilakukan di kota dan di desa. Pembangunan antar keduanya ini harus saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain, dimana kekurangan yang ada di kota harus dilengkapi oleh kelebihan yang ada di desa, begitu juga sebaliknya. Selain itu, pembangunan desa-kota ini juga harus setara agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat desa dan kota.

### 3. Kepemerintahan

Pembangunan daerah merupakan usaha megembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah dalam rangka memantapkan otonomi daerah yang dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Adanya pemerintahan daerah yang selalu mendukung dan memberikan peluang kepada wilayah-wilayah yang ada di daerahnya untuk berkembag dan lebih maju, akan menghasilkan pembangunan daerah yang lebih baik dan lebih berkualitas. Selain itu pemeritahan yang baik dan bertanggung jawab juga akan membentuk daerah yang sejahtera dan mamur.

## **D. Pembangunan Infrastruktur**

### **1. Pengertian Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara fisik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang termasuk dalam infrastruktur adalah sarana prasarana dan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, transportasi, listrik, Rumah Sakit, pendidikan dan lain sebagainya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Infrastruktur merupakan fasilitas-fasilitas penunjang untuk kelancaran aktifitas-aktifitas didaerah baik dari segi ekonomi maupun sosial. Sebagai contoh kecil saja seperti pembangunan jalan, kualitas jalan menggambarkan tentang tingkat pertumbuhan dan perkembangan di daerah, hal ini juga mempengaruhi minat dari khalayak ramai baik investor maupun konsumen.

Menurut Vaughn and Pollard (2003) dalam Prapti (2015: 84) bahwa infrastruktur secara umum meliputi jalan, jembatan, air dan sistem pembuangan, bandar udara, pelabuhan, bangunan umum, dan juga termasuk sekolah-sekolah,

fasilitas kesehatan, penjara, rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, kebakaran, tempat pembuangan sampah dan telekomunikasi. Semakin bagus kondisi jalan yang ada di daerah, maka akan semakin banyak pula peminat daerah tersebut sehingga perkembangan dan kemajuan daerah tersebut tidak bisa diragukan lagi. Kondisi jalan yang ada di suatu daerah akan menjadi bukti kuat dari pembangunan yang ada di daerah tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Todaro dan Smith (2006: 128) bahwa ribuan prajurit berpartisipasi dalam program sukarela untuk pensiun dari dinas militer aktif untuk membangun infrastruktur, yang mencakup proyek jalan besar timur-barat yang menantang secara teknis, sebuah program yang diakui di Taiwan sebagai faktor utama atas kesuksesan pembangunannya.

Pentingnya pembangunan infrastruktur, terlebih pembangunan jalan tidak bisa dipungkiri lagi. Jalan sangat berperan besar dalam kemajuan dan perkembangan pembangunan dalam hal ini di suatu daerah. Masyarakat bisa melakukan apa saja demi terciptanya pembangunan yang berkualitas untuk kemajuan daerahnya. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan jalan sangatlah diperlukan. Jalan bisa dijadikan sebagai alat tumpangan atau perantara dalam kegiatan pengolahan barang. Salah satu fungsi jalan juga adalah untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini jalan sangat diperlukan untuk mobilisasi masyarakat baik dalam hal barang, jasa maupun ekonomi, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan serta kemajuan masyarakat bergantung kepada jalan yang ada di daerahnya.

Keadaan infrastruktur yang ada di daerah akan mempengaruhi pembangunan di daerah tersebut. Semakin memadainya infrastruktur yang ada di daerah maka akan semakin cepat pula perkembangan daerah tersebut, demikian

pula sebaliknya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hendra (1987: 362) bahwa pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk mendatangkan *input*, baik yang tetap maupun yang variabel, untuk usaha-usaha produksi, dan diperlukan pula untuk memasarkan bahan dan barang yang dihasilkan di setiap lokasi atau wilayah dalam negara yang bersangkutan. Minimnya dan kurang memadainya pembangunan infrastruktur disuatu daerah akan menjadi penghambat dan peningkatan produksi-produksi serta akan menjadi penghalang bagi investor-investor serta perusahaan-perusahaan yang akan mengembangkan sayapnya di daerah tersebut.

Pembangunan infrastruktur menjadi tanggung jawab dari pemerintah dimana pemerintah bertugas untuk menyediakan fasilitas-fasilitas umum dalam hal ini adalah infrastruktur untuk masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muljana (1995: 3) bahwa yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai fungsi yang esensial sebagai pembuka peluang dan pendukung kegiatan-kegiatan produksi, logistik dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan-kegiatan lain dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Pemerintah sangat bertanggung jawab besar atas pembangunan infrastruktur agar dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Pembangunan infrastruktur berfungsi sebagai penunjang aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat maupun daerah itu sendiri, dengan kata lain pembangunan infrastruktur sangat membantu perkembangan daerah baik dalam perkembangan ekonomi, sosial maupun lainnya.



Menurut Stiglits pada tahun 1997 dalam Iwan dan Rochmin (2004: 81) bahwa infrastruktur dibagi menjadi enam bidang diantaranya pendidikan, teknologi, finansial, komunikasi dan transportasi, perlindungan sumber daya alam serta infrastruktur sosial. Pembangunan infrastruktur pada dasarnya mengacu pada pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang berupa pembangunan fisik. Sangat wajar apabila pembangunan infrastruktur dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan disuatu daerah mengingat pembangunan infrastruktur mencakup banyak aspek.

Menurut beberapa penjelasan diatas tentang pembangunan infrastruktur, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dimana pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh atas terpenuhinya fasilitas-fasilitas umum yang berupa pembangunan fisik disuatu daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan serta mengembangkan potensi dan perkembangan daerah untuk menuju ke daerah yang lebih modern, dimana pembangunan infrastruktur ini diberikan agar bermanfaat bagi daerah yang tertinggal serta kurang berkembang baik dari segi ekonomi maupun sosial. Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu dimanfaatkan dalam pelestarian dan pengembangan potensi-potensi yang ada di daerah, baik potensi masyarakatnya maupun potensi daerahnya sendiri sekaligus untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat daerah.

## **2. Macam-Macam Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, namun hal tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan apabila tidak ada fasilitas-fasilitas umum atau infrastruktur yang tersedia. Berikut beberapa

macam pembangunan infrastruktur menurut Muljana (1995: 24-26) diantaranya yaitu:

a. Perhubungan

Pembangunan disektor perhubungan diarahkan untuk memperlancar arus manusia, barang, jasa dan informasi. Adanya pembangunan perhubungan ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan, mempercepat laju pertumbuhan ekonomi serta membantu usaha-usaha dalam menjaga stabilitas nasional. Pembangunan perhubungan meliputi perhubungan darat, perhubungan laut dan perhubungan udara (Muljana, 1995: 73). *Pertama*, pembangunan perhubungan darat diantaranya yaitu pembangunan jalan dan jembatan, angkutan jalan raya, angkutan kereta api, angkutan sungai, danau dan penyebrangan. *Kedua*, pembangunan perhubungan laut yaitu diantaranya pembangunan kapal dan dermaga. *Ketiga*, pembangunan perhubungan udara yaitu diantaranya penambahan daya tampung armada, perluasan jaringan penerbangan dan penambahan frekuensi pembangunan.

b. Ketenagaan dan kelistrikan

Jenis infrastruktur lain yang sangat vital dalam mensukseskan usaha pembangunan dibidang dan sektor manapun adalah ketenagaan dan kelistrikan. Pembangunan tenaga listrik diarahkan untuk menyediakan energy listrik dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk jangka waktu yang lama. Hal ini dilakukan agar pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik menjadi sama rata dengan kualitas yang baik.

### c. Agama dan pendidikan

Pembangunan agama dan pendidikan sangat diperlukan untuk mendapatkan masyarakat yang berkualitas. Pembangunan agama bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pondasi untuk pembangunan nasional. Pembangunan agama dilakukan untuk membekali masyarakat agar mampu menciptakan keserasian, keselarasan dan keseimbangan baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dalam lingkungannya.

Pendidikan merupakan salah satu jalur utama dalam usaha mengembangkan sumber daya manusia dan dalam meningkatkan mutu masyarakat. Pembangunan pendidikan dilakukan dengan peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, perluasan kesempatan belajar kejenjang yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Tujuan utama pembangunan pendidikan adalah untuk menjadikan generasi muda sebagai kader penerus bangsa.

## **E. Kesenjangan Pembangunan**

### **1. Pengertian Kesenjangan Pembangunan**

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas dan besar dimana letak geografis nya terpisah-pisah dan terdiri dari beribu-ribu pulau, membuat pembangunan di Indonesia menjadi tidak merata. Kondisi ini sangat menyulitkan bagi pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan, ditambah lagi dengan kebudayaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda serta tingkat kebutuhan di setiap daerah yang berbeda, dengan kata lain pembangunan di setiap daerah dan kebutuhannya juga tidaklah sama. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya

kesenjangan pembangunan di Indonesia, begitupun dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jarak antara pulau satu dengan pulau lain yang sangat jauh semakin menambah banyaknya daerah yang masih susah dijangkau oleh pemerintah baik dari segi pembangunan maupun yang lainnya.

Kesenjangan pembangunan bukanlah hal yang baru bagi negara berkembang, hal ini seakan-akan membuktikan bahwa negara yang berkembang berkembang sudah pasti akan mengalami kesenjangan di daerahnya. Kesenjangan dan pertumbuhan sering kali menjadi perdebatan antara mengutamakan efisiensi dan pertumbuhan disatu pihak atau melawan mengutamakan efektivitas dan pemerataan dipihak lain (Dumairy, 1996:55). Pertumbuhan disuatu negara maupun daerah tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan, dengan kata lain ketika terjadi pertumbuhan disuatu daerah maka akan terjadi kesenjangan pula di daerah lainnya. Antara kesenjangan dan pembangunan merupakan pilihan yang sangat berat dimana disatu sisi harus lebih mementingkan sesuatu hal yang sudah benar kegunaannya, dimana hal tersebut merupakan cara yang tepat dalam menjalankan pertumbuhan, dan disisi lain harus mengenyampingkan kepentingan tadi yang sudah jelas akan bisa mendapatkan hasil dalam pemerataannya.

Pembangunan mengharuskan adanya tingkat GNI yang tinggi dan pertumbuhan berkelanjutan, apabila peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya dilakukan oleh segelintir orang kaya maka peningkatan hasil kemungkinan besar menguntungkan mereka, kemajuan upaya menanggulangi kemiskinan akan bergerak lambat dan kesenjangan akan memburuk. Sedangkan pertumbuhan yang dihasilkan oleh orang banyak, maka mereka pulalah yang akan memperoleh manfaat besarnya dan hasil pertumbuhan ekonomi akan terbagi lebih merata

(Todaro dan Smith, 2011: 251). Kesenjangan pembangunan terjadi karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian orang, dengan kata lain tidak semua elemen masyarakat ikut serta dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk mengatasi terjadinya kesenjangan pembangunan, maka diperlukan partisipasi dari seluruh kalangan masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena jika pertumbuhan ekonomi hanya dilakukan oleh sebagian orang, maka kesejahteraan juga hanya akan dirasakan oleh sebagian orang. Masalah kesenjangan pembangunan tidak akan terselesaikan jika semua elemen masyarakat tidak bersatu untuk mengatasinya.

Pemerataan sama pentingnya dengan kemakmuran, pengurangan kesenjangan sama pentingnya dengan pengurangan kemiskinan (Dumairy, 1996: 66). Kesenjangan pembangunan harus diatasi dengan pemerataan pembangunan sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera dan maksmur. Selain itu, adanya upaya dalam mengatasi kesenjangan sama halnya dengan meminimalisir jumlah kemiskinan yang ada. Kesenjangan yang begitu mencolok bisa dijadikan sebagai tuduhan atas ketidak adilan dimana berarti tidak ada upaya dalam mengatasi kesenjangan tersebut sehingga sangat jelas keberadaannya. Selain itu, menurut Kuncoro (2004) dalam Mairisa (2017: 572) bahwa alokasi anggaran pembangunan juga sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan, hal ini perlu lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah. Strategi alokasi anggaran harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan atau kesenjangan regional.

Kesenjangan pembangunan yang terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, faktor utamanya adalah letak geografis yang terpisah-pisah antara

daerah satu dengan daerah lainnya. Hal ini juga membuat daerah-daerah yang jauh akan sangat sulit untuk dijangkau. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hendra (1987: 114) bahwa kesenjangan pembangunan secara geografis di negara-negara berkembang bukan saja terdapat antara daerah kota dan pedesaan tetapi juga antara satu kesatuan wilayah dengan wilayah lainnya, seperti misalnya, propinsi, kabupaten dan sebagainya. Jika selama ini kesenjangan pembangunan diidentikkan dengan pembangunan di perkotaan dan pedesaan, berbeda halnya dengan negara berkembang seperti di Indonesia. Di Indonesia kesenjangan pembangunan tidak hanya terjadi antara desa dan kota, namun kesenjangan di Indonesia terjadi pada area yang lebih luas lagi seperti pada tingkat kabupaten dan provinsi, dengan kata lain jika di tingkat provinsi sudah terjadi kesenjangan pembangunan, maka secara otomatis pada tingkat kabupaten juga pasti terjadi kesenjangan, dan yang paling fatal pastinya pada kesenjangan pembangunan tingkat desa. Selain itu, menurut Baswir dkk (1999: 8) bahwa sektor pertanian identik dengan pedesaan dan sektor industri dengan perkotaan maka pada tahap berikutnya akan terjadi ketimpangan antara pendapatan penduduk di pedesaan dengan perkotaan.

Kesenjangan juga terjadi antara daerah yang cepat tumbuh dengan daerah yang tertinggal, kesenjangan antar daerah terlihat dari adanya kesenjangan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan perkapita (Sjafrizal, 2012:33). Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan antar daerah adalah adanya perbedaan dalam pengelolaan daerah baik dari segi ekonomi maupun dari potensinya. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi disuatu daerah akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi didaerah lainnya tertinggal. Hal ini dikarenakan penanganan dan pengelolaan dimasing-masing daerah tidak merata,

dengan kata lain kesenjangan pembangunan antar daerah dikarenakan terjadinya perbedaan perlakuan sejak mulai awal.

Kesenjangan antara daerah yang cepat maju dan relatif tertinggal dibuktikan melalui sebuah fakta bahwa di Asia Timur dengan tingkat kesenjangan yang rendah telah tumbuh dengan cepat, sedangkan di Amerika Latin serta Afrika dengan tingkat kesenjangan yang tinggi tumbuh dengan sangat lamban (Todaro dan Smith, 2011:237). Ada perbedaan yang sangat menonjol antara kesenjangan daerah yang terjadi di negara yang maju dengan kesenjangan antar daerah yang terjadi di negara berkembang. Kesenjangan yang terjadi di negara maju biasanya relatif kecil karena kondisi negara yang sudah mulai stabil sehingga kesenjangan bisa diatasinya dengan baik. Sedangkan untuk negara berkembang, kesenjangan antar daerah masih sangat tinggi, hal ini dikarenakan pada negara berkembang pembangunan masih merintis dari awal dulu sehingga perlu dilakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan, dimana untuk negara berkembang pembangunan tidak bisa dilakukan keseluruhan secara spontan, karena salah satu penghambatnya adalah terbatasnya dana.

Adanya kebijakan pembangunan yaitu salah satu tujuannya adalah untuk menanggulangi terjadinya ketimpangan dan ketidak seimbangan dalam masyarakat. ketimpangan dan ketidak seimbangan tersebut merupakan salah satu kondisi terjadinya kesenjangan yang bersifat struktural. Menurut Hendra (1987: 277) berikut merupakan beberapa cakupan tentang kesenjangan yang bersifat struktural, diantaranya adalah:

- a. Keadaan sumber daya produksi yang tersedia tetapi dengan kelangkaan modal dan keterbatasan pada sumber daya manusia dari sudut

keterampilan teknis, keahlian, profesional, kemampuan pengelolaan, (*managerial capability*), tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi.

- b. Penggunaan sumber daya produksi digunakan pada produksi primer sehingga menimbulkan pengangguran terselubung yang menekan produktivitas tenaga manusia.
- c. Kesenjangan dalam pola pembagian kekayaan dan pendapatan antar golongan, antar daerah, antara lingkungan kota dan pedesaan.
- d. Kerangka institusional dalam tata susunan masyarakat dan perilaku dalam pergaulan hidup yang kurang memadai tuntutan modernisasi.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa cakupan diatas, bahwa kesenjangan yang sifatnya struktural merupakan kondisi dimana banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan oleh masyarakat namun masyarakat tidak bisa memanfaatkan hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk mengolahnya, hal ini juga berakibat terhadap semakin bertambahnya jumlah pengangguran karena masyarakat tidak mempunyai pekerjaan. Kesenjangan struktural juga merupakan kesenjangan yang terjadi karena ketidak merataan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, karena mereka tidak bisa merasakan kekayaan dan pendapatan seperti halnya masyarakat di daerah lain. Terakhir adalah rencana lembaga-lembaga pemerintahan yang kurang tersusun dengan baik, mengakibatkan kurang maksimalnya interaksi yang dilakukan masyarakat untuk menuju perubahan yang lebih maju.

Kesenjangan pembangunan yang terjadi di daerah selain karena disebabkan oleh masyarakatnya, pemerintah juga ikut andil dalam kesenjangan pembangunan antar daerah. Hal ini disebabkan salah satunya karena campur tangan



pemerintah yang terlalu besar dalam perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat tidak bisa berkembang sesuai kemampuannya karena pemerintah yang mengendalikan masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hendra (1987: 283) bahwa intervensi pemerintah harusnya bermaksud dan bermakna untuk menanggulangi dan meniadakan keganjilan dan ketimpangan yang melekat pada struktur ekonomi, bukan sebaliknya, dimana secara sadar atau tidak sadar intervensi pemerintah justru membawa akibat yang cenderung memperkuat distorsi yang sudah ada dan menimbulkan distorsi yang baru.

Potensi yang dimiliki oleh suatu daerah pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengolah dan mengembangkan serta melestarikannya. Namun, hal ini bukan berarti pemerintah bisa mengendalikan masyarakat dimana masyarakat harus bekerja sesuai dengan keinginan pemerintahnya. Campur tangan pemerintah yang terlalu besar dalam perekonomian masyarakat bukannya memperkecil angka kesenjangan di daerah tersebut, tetapi justru semakin memberikan akibat yang lebih buruk. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak bisa berkreasi sesuai keinginannya, sehingga perkembangan masyarakat tidak bisa berkembang pesat. Ketika masyarakat dibebaskan dalam berkreasi, maka masyarakat bisa mengeluarkan segala potensi yang dimilikinya dan tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk berkembang secepat mungkin. Kondisi dimana pemerintah menjadi pengendali bagi masyarakat bisa juga menjadi awal dari keterlambatan perkembangan masyarakatnya. Hal inilah yang mengakibatkan bertambahnya masalah lain padahal masalah sebelumnya masih belum terselesaikan.

Kesenjangan pembangunan antar daerah mempunyai banyak arti yang luas. Selain beberapa penjelasan tentang kesenjangan pembangunan diatas, berikut adalah beberapa definisi kesenjangan menurut teori para ahli (Mulyadi, 2014:25) diantaranya adalah:

1) Menurut Andrinof A. Chaniago

Kesenjangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial.

2) Menurut Budi Winarno

Kesenjangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat.

3) Menurut Jonathan Haughton dan Shahidur R. Khandker

Kesenjangan sosial adalah bentuk-bentuk ketidak-adilan yang terjadi dalam proses pembangunan.

4) Roichatul Aswidah

Kesenjangan sosial sering dipandang sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi.

Menurut Saratri (2009: 174) bahwa pada bidang sosial, kesenjangan ditunjukkan oleh fakta dengan beberapa indikator. *Pertama, Physical Quality of Live Index. Kedua, jumlah murid sekolah dasar dibanding jumlah total penduduk. Ketiga, persentase tenaga kerja yang berpendidikan akademi atau universitas. Keempat, rasio guru Sekolah Dasar tiap 10.000 murid. Kelima, rasio Dokter setiap 10.000 penduduk. Keenam, rasio tempat tidur Rumah Sakit tiap 10.000 penduduk.*

Definisi kesenjangan dari beberapa ahli diatas berbeda-beda namun mempunyai arti yang sama dimana pada dasarnya kesenjangan merupakan kondisi

yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya dikarenakan pembangunan yang dilakukan lebih difokuskan pada pembangunan ekonomi sehingga terjadilah ketidak seimbangan antar pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Ketika pembangunan di fokuskan pada pembangunan ekonomi secara otomatis akan terjadi kesenjangan antar daerah, hal ini mengakibatkan ketidakadilan bagi tiap-tiap daerah sebagai akibat dari kegagalan pembangunan secara fisik masyarakat.

## **2. Faktor Penyebab Kesenjangan Pembangunan**

Daerah-daerah yang tidak mengalami kemajuan disebabkan karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, seperti adanya kecenderungan pemilik modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi juga tenaga terampil (Mairisa, 2017: 571). Banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan di daerah, salah satunya yaitu perbedaan pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang dibangun di tiap-tiap daerah. Berikut juga merupakan beberapa faktor utama yang menyebabkan atau memicu terjadinya kesenjangan pembangunan antar daerah menurut Sjafrizal (2012: 119-121) diantaranya adalah:

### **a. Perbedaan kandungan sumber daya alam**

Penyebab utama yang mendorong timbulnya kesenjangan pembangunan antar daerah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing daerah. Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan kandungan sumberdaya alam ini di Indonesia ternyata cukup besar. Ada daerah yang mempunyai minyak dan gas alam, tetapi daerah lain tidak mempunyai. Ada daerah yang mempunyai deposit

batubara yang cukup besar, tapi daerah lain tidak ada. Demikian pula halnya dengan tingkat kesuburan lahan yang juga sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah.

b. Perbedaan kondisi demografis

Faktor utama lainnya yang juga dapat mendorong terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah adalah bilamana terdapat perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografis yang dimaksudkan disini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku, kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan.

c. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi atau daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan. Akibatnya, kesenjangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu

daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

d. Konsentrasi kegiatan ekonomi daerah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula sebaliknya bilamana, konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.

e. Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Investasi merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Daerah dengan alokasi investasi yang lebih besar baik dari pemerintah maupun swasta, cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat sehingga dapat mendorong proses pembangunan daerah seperti melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, begitupula sebaliknya.

Menurut Sjafrizal (2008) Kesenjangan antar wilayah merupakan aspek umum yang terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Kesenjangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah (Mairisa, 2017: 573).

Kesenjangan antar wilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat pembangunan antar wilayah yaitu antara daerah maju dan daerah berkembang, dengan kata lain kondisi dari tiap-tiap wilayah yang ada di suatu daerah sangat menentukan terjadinya kesenjangan pembangunan di daerah tersebut.

### **3. Dampak Kesenjangan Pembangunan**

Secara sosiologis, kesenjangan antar wilayah merupakan suatu bentuk ketidakadilan sosial. Sementara itu, ketidakadilan sosial itu sendiri merupakan salah satu akar dari penyebab konflik sosial. Oleh sebab itu, kesenjangan pembangunan antar wilayah mengandung bahaya laten karena dapat memicu konflik sosial. Potensi konflik sosial yang berbasis sentimen kedaerahan semakin besar di era otonomi daerah belakangan ini. Pada era otonomi daerah ini, muncul suatu kecenderungan penguatan identitas kelompok sosial yang berbasis daerah, yang terkadang juga disertai dengan identitas etnis bahkan agama. Munculnya sentimen yang menuntut agar kekuasaan di suatu daerah berada di tangan “putera daerah” atau tuntutan agar rekrutmen tenaga kerja diprioritaskan bagi putera daerah, hal ini merupakan perwujudan dari fenomena tersebut.

Menurut Todaro dalam Hesty (2014) bahwa kesenjangan memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari kesenjangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju dan berkembang untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari kesenjangan yang ekstrim antara lain adalah inefisiensi atau pemborosan ekonomi, melemahkan stabilitas dan solidaritas sosial serta kesenjangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil untuk kesejahteraan masyarakat (Mairisa, 2017: 574). Ketimpangan atau kesenjangan

pembangunan yang terjadi di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Karena dampak yang ditimbulkan dari ketimpangan pembangunan tersebut akan mengganggu proses pertumbuhan ekonomi secara nasional. Menurut Sjafrizal dalam Widi Asih (2015: 35) berikut merupakan dampak yang terjadi bila ketimpangan pembangunan di Indonesia semakin parah diantaranya:

a. Terpusatnya kegiatan perekonomian di satu daerah

Dampak terpusatnya kegiatan ekonomi ini dapat berupa dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah pembangunan di satu daerah berkembang dengan pesat. Selain itu pengaturan distribusi faktor-faktor dan hasil produksi menjadi semakin mudah. Namun juga menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya tingkat kriminalitas dan pengangguran. Hal tersebut merupakan imbas dari melonjaknya pertumbuhan penduduk di satu daerah namun lapangan pekerjaan yang disediakan tidak dapat menyerap seluruh tenaga kerja.

b. Tertinggalnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah

Dampak inilah yang paling sering terlihat dalam ketimpangan pembangunan di Indonesia. Daerah-daerah yang pembangunannya tertinggal biasanya berada di daerah perbatasan dan kawasan timur Indonesia seperti Nusa Tenggara dan Papua. Di daerah-daerah tersebut pembangunan ekonomi hingga pendidikan seolah berjalan di tempat. Meskipun berbagai kebijakan yang mendorong pembangunan sudah digalakkan pemerintah namun hasil nyata dari pembangunan tersebut kurang terlihat. Padahal daerah-daerah tersebut istilahnya menjadi “Beranda Rumah” Negara

Indonesia. Dan “Beranda Rumah” biasanya mencerminkan sifat “Pemilik Rumah” itu sendiri.

c. Ketidakpuasan daerah terhadap kinerja pembangunan pemerintah pusat

Pembangunan di Indonesia mayoritas masih dipusatkan di Pulau Jawa dan Bali. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana di Pulau Jawa dan Bali lebih lengkap dibandingkan daerah lain di Indonesia. Sehingga seolah-olah Pulau Jawa di “anak emas” kan oleh pemerintah sedangkan daerah lain kurang terurus. Secara tidak langsung hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan sosial yang dapat menimbulkan konflik sosial. Indonesia pernah mengalami berbagai pergolakan daerah dikarenakan pembangunan yang tidak merata. Seperti pergolakan yang dilakukan oleh PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) pada dekade 50-an lalu. Pada saat itu pembangunan terlalu difokuskan di Jawa sehingga daerah lain merasa tidak puas dan pada akhirnya melakukan pergolakan.

d. Meningkatnya ketimpangan pendapatan dan kemiskinan

Dampak ini merupakan akumulasi dari dampak-dampak sebelumnya. Kurangnya dukungan dan bantuan pemerintah terhadap suatu daerah akan cenderung menyebabkan masyarakat di daerah tersebut kurang produktif. Selain itu ketimpangan pembangunan akan memberikan dampak negatif bagi perekonomian suatu daerah yang pada akhirnya akan menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan.

Dalam konteks seperti ini, maka kesenjangan pembangunan antar daerah dapat memicu disintegrasi sosial pada daerah itu sendiri. Bahaya disintegrasi daerah



ini akan semakin besar jika ketertinggalan daerah tersebut disertai dengan tersedotnya kekayaan daerah tertinggal tersebut kepusat (daerah maju) disisi yang lain. Hal ini akan semakin memperkuat rasa ketidakadilan pada masyarakat di daerah tertinggal tersebut. Dalam keadaan demikian, maka tidaklah mengherankan jika muncul tuntutan yang semakin kuat dari daerah yang tertinggal untuk melepaskan diri dari daerah induknya.

Selain itu, kesenjangan antar daerah juga mendorong migrasi penduduk dari daerah yang tertinggal ke daerah yang lebih maju, hal ini mempunyai dampak yang tidak kecil juga. Salah satunya adalah semakin bertambah banyaknya kelompok miskin yang berada di daerah maju seperti kota-kota besar. Penduduk miskin di perkotaan biasanya rawan berbagai ketidakadilan dan eksploitasi. Disisi yang lain, kemiskinan juga dapat mendorong kriminalitas, radikalisme, dan konflik sosial di perkotaan.

## **F. Kesejahteraan Masyarakat**

### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki beberapa arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), *pertama* yaitu dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya makmur, dalam keadaan sehat dan damai. *Kedua* yaitu dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. *Ketiga* yaitu dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Sejahtera mempunyai arti yang sangat beragam dimana sejahtera menggambarkan tentang keadaan yang dirasakan oleh individu maupun kelompok dimana rasa tersebut berupa rasa yang

nyaman karena terbebas dari bahaya dan gangguan, tidak merasakan takut dan khawatir dimana individu atau kelompok sudah terpenuhi segala kebutuhannya tanpa kekurangan apapun, ditambah lagi dengan pelayanan yang maksimal dari pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh individu maupun kelompok. Menurut Munawar dkk (Tafsiran Pancasila dan UUD 1945: 56) bahwa ada beberapa definisi tentang kesejahteraan ditinjau dari beberapa aspek diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Aspek ekonomi

Orang dikatakan sejahtera manakala memiliki pendapatan dan kekayaan yang melimpah. Tingkat kesejahteraan seseorang diukur dari segi ekonomi, dimana sejahtera itu ketika seseorang mempunyai banyak harta benda dan hidup berkecukupan tanpa kekurangan apapun bahkan berlebihan, dalam kondisi seperti inilah maka seseorang baru bisa dikatakan sejahtera.

b. Aspek sosial

Orang disebut sejahtera kalau orang itu memiliki eksistensi dalam masyarakat sehingga bisa berinteraksi secara bebas dengan orang lain. Dalam hal ini kesejahteraan diukur sesuai dengan seberapa luas interaksi sosial seseorang dengan orang lain. Semakin banyak interaksi sosial yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dari berbagai kalangan maka semakin sejahtera kehidupan orang tersebut. Begitu juga dengan kedudukan yang dimiliki seseorang, semakin tinggi kedudukannya maka akan semakin tinggi juga interaksi sosial orang tersebut sehingga tingkat kesejahteraannya pun semakin meningkat.

### c. Aspek spiritual

Kesejahteraan tidak hanya terkait semata-mata dengan ukuran keberlimpahan kekayaan material atau ketinggian status sosial, tetapi ditentukan oleh derajat pemaknaan batiniah seseorang terhadap kekayaan tersebut. Sejahtera tidak cukup hanya dengan kekayaan yang dimiliki serta kedudukan tinggi yang didapatkan, tetapi sejahtera apabila kekayaan dan kedudukan tinggi tersebut dilengkapi dengan pemahaman akan kegunaan dari kekayaan dan kedudukan tersebut secara ilmu keagamaan.

Menurut Wisnuadji (2008: 2) menjelaskan bahwa tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan dimana tingkat kepuasan merujuk pada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas, serta kesejahteraan adalah kondisi dari kepuasan individu-individu. Ketika kita berbicara tentang kesejahteraan, maka secara otomatis kita juga akan membahas tentang kepuasan. Kesejahteraan dan kepuasan saling berhubungan dan keduanya mempunyai perbedaan yang sangat tipis dimana kepuasan digunakan untuk perorangan sedangkan kesejahteraan digunakan untuk kelompok, namun sama-sama menjelaskan tentang kondisi yang dialaminya.

Lebih lanjutnya Robi dalam Narwoko (2006: 114) mengemukakan bahwa tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbatasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Kesejahteraan dalam pengertian ini tidak hanya membicarakan tentang ekonomi, sosial dan spiritual, namun disini penjabaran kesejahteraan lebih diperluas lagi yang

mencakup *pertama*, pendidikan yang berkualitas. Adanya pendidikan bisa mengembangkan sumber daya manusia dalam hal ini masyarakat sehingga nantinya bisa bersaing dengan masyarakat lain dan menjadikan masyarakat yang sejahtera dan makmur. *Kedua*, peningkatan perbaikan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang baik akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini akan berdampak terhadap peningkatan taraf hidup dan kecerdasan serta kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, perlindungan sosial dari pemerintah. Perlindungan sosial yang dimaksudkan adalah dapat berupa peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. Hal ini bisa dilakukan dengan menaikkan upah masyarakat.

Kesejahteraan tidak hanya diinginkan oleh individu saja, tetapi kesejahteraan juga menjadi tujuan dari sekelompok orang dalam hal ini adalah masyarakat di daerah. Oleh karena itu Munawar dkk (Tafsiran Pancasila dan UUD 1945: 58) membagi kesejahteraan menjadi dua bagian yaitu kesejahteraan individu dan kesejahteraan umum. Kesejahteraan individu adalah kesejahteraan yang dirasakan oleh perorangan, sedangkan kesejahteraan umum adalah kesejahteraan yang dirasakan oleh semua orang dalam satu kesatuan. Dalam hal ini lebih ditekankan dalam kesejahteraan umum, dimana pemerintah yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakat banyak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Jaminan tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia sudah tercantum dalam UUD 1945 dimana Pemerintah yang bertanggung jawab penuh atas terciptanya masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang cerdas, serta masyarakat yang damai yang bisa merasakan keadilan dari Pemerintah Negara Indonesia. Kesejahteraan masyarakat secara umum akan terwujud apabila segala kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi dengan baik. Berikut merupakan tingkatan kebutuhan masyarakat umum menurut Munawar dkk (Tafsiran Pancasila dan UUD 1945: 59-60) diantaranya adalah:

- a. Kebutuhan primer, adalah kebutuhan yang menjamin manusia bisa hidup layak. Kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan yang paling utama dan wajib untuk dimiliki bagi setiap orang seperti pakaian, makanan serta tempat tinggal. Selain itu, pendidikan dan kesehatan juga termasuk dalam kebutuhan primer.
- b. Kebutuhan sekunder, adalah kebutuhan yang dipenuhi agar manusia tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan ini sifatnya tidak wajib, ia hanya sebagai tambahan saja dari kebutuhan primer.
- c. Kebutuhan tersier, adalah tingkat kebutuhan yang menyempurnakan kebutuhan sekunder. Pada tingkat pemenuhan tersier merupakan upaya pemenuhan kebutuhan agar terlihat mewah. Tingkatan ini merupakan tingkatan kebutuhan terting pemenuhannya namun terendah tingkat dibutuhkannya.

Sesuai dengan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kesejahteraan umum masyarakat yang sepenuhnya ditanggung pemerintah yaitu

pada pemenuhan kebutuhan primer saja, dimana kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi pemenuhannya. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier pemerintah tidak bertanggung jawab, hal ini dikarenakan dua kebutuhan tersebut bukanlah kebutuhan yang utama bagi masyarakat, dengan kata lain kedua kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan pelengkap dan penunjang saja untuk kebutuhan primer. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier dipenuhi sendiri oleh orang yang bersangkutan.

## **2. Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial yang berbunyi: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Masalah sosial yang saat ini lagi marak didalam masyarakat dikarenakan belum terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat baik dari aspek sosial, materi maupun spiritual. Kurangnya pelayanan yang bisa dirakan oleh masyarakat ini berdampak terhadap kualitas masyarakat yang tidak maksimal sehingga mengakibatkan terhambatnya fungsi sosial masyarakat.

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan (Suharto, 2005:3). Kesejahteraan sosial bisa dirasakan oleh seseorang maupun masyarakat apabila kebutuhan-kebutuhannya sudah terpenuhi dengan baik. Jika seseorang atau masyarakat masih mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhannya baik sosial, ekonomi maupun spiritual, berarti orang

tersebut masih belum bisa dikatakan sejahtera. Seseorang atau masyarakat bisa dikatakan sejahtera apabila kebutuhannya akan makan, pakaian dan tempat tinggal sudah terpenuhi, ditambah dengan pendidikan yang dan kesehatan yang sudah terjamin, dengan kata lain kesejahteraan sosial mencakup banyak hal yang upaya-upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun masyarakat untuk mencapai kondisi hidup yang sebaik-baiknya.

Sebagai warga negara, masyarakat mempunyai hak-hak yang sudah wajib baginya untuk mendapatkannya. Pemerintah sebagai aparat negara mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak tersebut termasuk didalamnya mengenai kesejahteraan masyarakat dimana masyarakat harus mendapatkan kehidupan yang layak. Masyarakat yang biasanya rawan dari ketidak sejahteraan adalah masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hendra (1987: 601) bahwa kesejahteraan sosial di pedesaan pada umumnya masih rendah, maka masalah yang mereka hadapi lebih banyak berupa masalah ekonomi yaitu bagaimana meningkatkan peluang bekerja untuk meningkatkan pendapatannya, dan bagaimana mereka bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan ekonomi mereka.

Kesejahteraan sosial merupakan makna dari kondisi seseorang ataupun masyarakat yang sudah terpenuhi semua kebutuhannya. Menurut Fahrudin (2012:10) kesejahteraan sosial mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.

- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Seseorang ataupun masyarakat membutuhkan kesejahteraan agar kehidupannya tidak sengsara. Jika kebutuhan-kebutuhan dasar manusia masih belum bisa dipenuhi, maka manusia tersebut akan berada pada kondisi yang tidak stabil dan tidak bahagia dalam hidupnya. Oleh karena itu sangat diperlukan bagi manusia untuk mendapatkan kesejahteraan sosial dimana manusia bisa mencapai segala kebutuhan-kebutuhan pokoknya, manusia juga bisa berinteraksi dengan baik antar sesama sekaligus menjalin hubungan-hubungan yang harmonis. Hal ini bertujuan agar manusia bisa hidup dengan tentram, aman dan sejahtera, dengan kata lain kesejahteraan sosial merupakan wujud dari keberhasilan pembangunan. Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat (Suharto, 2005: 1). Kesejahteraan sosial mempunyai tugas untuk membantu masyarakat dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, dimana kesejahteraan sosial harus bisa mengangkat masyarakat yang tidak mampu menjadi masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhannya.

Sebagaimana penjelasan di atas mengenai kesejahteraan dan kesejahteraan sosial, dapat diambil kesimpulan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang di



dalamnya mencakup pemenuhan kebutuhan hidup. Masyarakat dikatakan sejahtera ketika mereka dapat hidup mandiri, hidup aman dan nyaman, mendapatkan pelayanan yang layak, dapat menjalani kehidupan sebagaimana mestinya seperti dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang sudah ada, serta terjalinnya hubungan sosial yang baik dalam lingkungannya.

## **G. Masyarakat Pesisir atau Kepulauan**

### **1. Pengertian Masyarakat Pesisir atau Kepulauan**

Secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, begitupula dengan kebudayaan negara Indonesia yang sangat beragam. Sebagai negara kepulauan tentunya daerah yang ada di Indonesia terdiri dari daratan dan perairan. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81.000 Km (terpanjang kedua di dunia sesudah Kanada) yang melingkupi 17.508 pulau (Iwan dan Rochmin, 2004: 245). Indonesia merupakan negara dengan wilayah perairan yang sangat luas apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Wilayah perairan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, oleh karena itulah Indonesia mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah.

Indonesia disebut sebagai negara maritim yaitu negara yang wilayah perairannya lebih besar dari wilayah daratannya. Daerah-daerah yang ada di Indonesia terpisah-pisah menjadi beribu-ribu pulau. Potensi pulau kecil di Indonesia diperkirakan mencapai 10.000 buah dari jumlah 17.508 pulau yang dimiliki oleh Indonesia (Kusumastanto, 2003:107). Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana kepulauan yang ada di Indonesia di bagi menjadi dua yaitu pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Jumlah pulau-pulau besar yang ada di Indonesia yaitu sekitar 7.000 pulau, dan sisanya merupakan pulau-pulau kecil.

Indonesia mempunyai keuntungan tersendiri dengan wilayah perairannya yang besar, dimana dari laut Indonesia bisa menghasilkan potensi yang sangat besar. Hal inilah yang bisa dijadikan sebagai kekuatan bagi Indonesia dan masyarakatnya dimana mereka bisa memanfaatkan segala potensi-potensi tersebut untuk kesejahteraan.

Menurut Ikhsani (2011) bahwa masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir (Imron, 2017: 28). Pada dasarnya masyarakat di daerah-daerah perairan dalam hal ini yaitu masyarakat kepulauan atau masyarakat pesisir mempunyai dua mata pencaharian yaitu pertanian dan kelautan. Rata-rata masyarakat yang tinggal di kepulauan bekerja sebagai petani dan nelayan. Pertanian yang dikerjakan masyarakat kepulauan biasanya adalah padi, jagung, kacang hijau dan lain sebagainya. Masyarakat kepulauan mempunyai ciri khas kebudayaan sendiri yang berbeda dari daerah-daerah lainnya.

Masyarakat pesisir memiliki sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang tentunya berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Sistem tersebut meliputi sistem ekonomi, pranata sosial masyarakat, sosial budaya, adat istiadat, sistem etika dan sopan santun, serta tokoh-tokoh masyarakat dan pengaruhnya, selain memiliki suatu sistem yang berbeda, masyarakat pesisir juga memiliki masalah-masalah yang berbeda pula (Kusnadi, 2009: 43). Masyarakat yang ada di daerah kepulauan atau yang disebut sebagai masyarakat pesisir, tidak hanya mempunyai kehidupan sendiri dimana kehidupan tersebut berbeda dengan kehidupan di luar pulau. Masyarakat pesisir juga mempunyai permasalahan-permasalahan yang sama sekali berbeda

dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah lainnya. Masyarakat pesisir masih bersifat kedaerahan dan tradisional dimana masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat-istiadat serta masih menjunjung tokoh-tokoh masyarakat.

Masyarakat kepulauan diidentikkan dengan masalah-masalah sosial seperti keterisolasian, ketertinggalan, kemiskinan dan sebagainya. Daerah kepulauan merupakan daerah yang sulit untuk dijangkau, sehingga kepulauan merupakan daerah pedesaan yang terbelakang. Masalah-masalah yang harus mereka hadapi antara lain: kemiskinan, kesenjangan sosial, keterbatasan modal dan teknologi, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, kebergantungan terhadap cuaca lautan, serta kebijakan dari pemerintah yang belum memihak pada masyarakat nelayan secara optimal (Inayatsani, 2015: 3). Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir dua kali lebih banyak apabila dibandingkan dengan masyarakat daratan. Masyarakat pesisir masih berkecimpung dengan kemiskinan karena terjadinya kesenjangan antara masyarakat pesisir dan daratan. Hal inilah yang menyebabkan terhambatnya akses-akses yang didapatkan oleh masyarakat kepulauan sehingga masyarakat pesisir tidak bisa berkembang dan maju. Masyarakat pesisir menjadi kurang berkualitas apabila dibandingkan dengan masyarakat daratan, ditambah dengan kondisi perekonomian masyarakat pesisir yang bergantung kepada kondisi alam secara musiman. Pemerintah yang kurang bisa menjangkau masyarakat pesisir juga menambah panjang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kepulauan.

## **2. Karakteristik Masyarakat Pesisir**

Sifat dan karakteristik serta pandangan hidup masyarakat kepulauan atau masyarakat pesisir dipengaruhi oleh alam lingkungannya. Masyarakat pesisir mempunyai hubungan yang sangat erat antar sesamanya, dimana masyarakat pesisir masih membudayakan sikap gotong royong dan kekeluargaan. Hal inilah yang membentuk karakter masyarakat kepulauan, dimana masyarakat pesisir sangat ramah-ramah dan selalu merangkul antar sesamanya. Masyarakat pesisir tergolong sebagai masyarakat desa yang terisolir. Berikut adalah karakteristik masyarakat desa menurut Roucek dan Waren dalam (Leibo, 1990:7) diantaranya:

- a. Besarnya peranan kelompok primer
- b. Faktor geografis yang menentukan sebagai dasar pembentukan kelompok atau asosiasi
- c. Hubungan atau relasi-relasi sosial bersifat intim dan langgeng
- d. Masyarakat masih bersifat homogen
- e. Mobilitas sosial masih rendah
- f. Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi
- g. populasi anak dalam proporsi yang lebih besar.

Pada masyarakat pesisir masih berfungsi peranan dari orang-orang yang dituakan atau dianggap sesepuh. Ada sekelompok orang-orang tertentu yang dihormati dimana orang tersebut mempunyai strata sosial yang tinggi dalam masyarakat. Orang tersebut akan dijadikan panutan dalam masyarakat di desa khususnya di pesisir. Sebagai masyarakat yang berada di kepulauan dimana secara geografis terletak jauh dari daratan, membuat masyarakat pesisir tidak mempunyai

mobilitas sosial yang tinggi dengan masyarakat daerah lain. Hal ini berdampak terhadap sifat masyarakat yang masih sama dan belum bisa berkembang.

Selain beberapa karakter diatas, Iwan dan Rochmin (2004: 251) juga menjelaskan bahwa sifat dan karakteristik masyarakat pesisir ditentukan oleh interaksi faktor-faktor sosial, ekonomi dan lingkungan, khususnya pada masyarakat pesisir karakteristik yang paling mencolok adalah ketergantungan pada musim. Indonesia sebagai negara yang hanya mempunyai dua musim berdampak terhadap karakteristik mata pencaharian masyarakat pesisir yang juga bersifat musiman. Seperti halnya dengan para nelayan, pada saat sudah waktunya musim penangkapan ikan, maka para nelayan akan sibuk ke laut untuk menangkap ikan, hal ini berpengaruh terhadap penghasilan nelayan juga menjadi besar, namun pada saat musim ombak dan angin kencang, maka nelayan akan menganggur dan hanya berdiam diri di rumah, otomatis pendapatannya juga akan menurun. Begitupula dengan petani. Pada musim hujan petani akan sibuk turun ke sawah untuk menanam padi, namun pada musim kemarau petani hanya dirumah saja tanpa bekerja.

### **3. Permasalahan Masyarakat Pesisir**

Daerah pesisir beserta masyarakatnya yang jauh dari jangkauan daratan dan pemerintahan mempunyai masalah yang sangat luas dalam masyarakatnya baik dari aspek ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan ini dapat diatasi apabila adanya penanganan yang intensif dari pemerintah. Berikut merupakan beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir menurut Iwan dan Rochmin (2004: 256-264) diantaranya adalah:

a. Kualitas sumber daya manusia dan kemiskinan

Permasalahan ini sebenarnya tidak hanya dihadapi oleh masyarakat pesisir, namun sudah menjadi masalah nasional dalam negara Indonesia dimana masalah ini berkaitan langsung dengan pembangunan dan struktur ekonomi, hanya saja masyarakat pesisir merasakan permasalahannya lebih berat dikarenakan letak geografisnya yang jauh. Mayoritas masyarakat pesisir masih berada dalam kemiskinan karena perekonomian masyarakatnya masih bergantung pada hasil laut, sedangkan penghasilan dari laut tidak bisa menjamin tepenuhinya kebutuhan masyarakat pesisir. Hal ini dikarenakan masyarakat pesisir tidak mempunyai keahlian dalam melaut karena tidak adanya pelatihan dalam hal melaut, sehingga masyarakat pesisir melaut dengan asal-asalan yang penting bisa mendapatkan ikan.

b. Aspek investasi dan ekonomi makro

Sebagai masyarakat pesisir yang mata pencahariannya rata-rata sebagai nelayan mempunyai resiko tinggi pada saat melakukan pekerjaannya dimana masyarakat mempertaruhkan nyawanya demi untuk mendapatkan ikan. Agar menjadi seimbang antara pengorbanan masyarakat dengan penghasilannya maka dibutuhkan modal yang sangat besar untuk penangkapan ikan, modal tersebut bisa dijadikan sebagai kompensasi bagi masyarakat yang sudah mempertaruhkan nyawanya. Namun tidak adanya investasi yang didapatkan oleh masyarakat pesisir membuat hal tersebut hanya berada di fikiran saja. Permasalahan ekonomi makro di daerah pesisir diakibatkan karena lemahnya kinerja industri secara keseluruhan dari pelaku-pelaku ekonomi yang mempunyai kepentingan di daerah pesisir.

c. Kerusakan lingkungan

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kerusakan lingkungan di daerah pesisir. *Pertama*, pencemaran dan sedimentasi. Masyarakat pesisir mempunyai tingkat pencemaran yang sangat tinggi, hal ini dikarenakan kemiskinan yang terjadi di masyarakat pesisir. *Kedua*, kerusakan fisik habitat ekosistem wilayah pesisir dan lautan. Kerusakan yang terjadi di daerah pesisir biasanya dikarenakan pembuatan tambak sehingga terumbu karang menjadi rusak dan lain sebagainya. *Ketiga*, eksploitasi sumber daya hayati laut secara berlebihan. Ikan yang ada di lautan selalu menjadi sasaran eksploitasi secara besar-besaran oleh masyarakat. Selain itu, kualitas juga berpengaruh terhadap habitat hidup dilaut, kondisi lingkungan yang kotor kemungkinan besar akan membunuh hewan-hewan yang ada di laut.

d. Kelemahan koordinasi

Daerah pesisir yang terbelakang dan terpencil mempunyai banyak permasalahan sekaligus kebutuhan dan kepentingan, hal ini akan memicu rawan terjadinya konflik. Jika tidak ada ketegasan dan perencanaan yang matang oleh pemerintah, maka konflik tersebut akhirnya tidak akan bisa dihindari. Maka perlu adanya peraturan yang nyata dan benar-benar diterapkan dalam masyarakat pesisir.